

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

◦ Pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,87 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11.

1. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu :
2. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,61 persen
3. Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen
4. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,17 persen
5. Kelompok kesehatan sebesar 1,92 persen
6. Kelompok transportasi sebesar 2,04 persen
7. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,61 persen
8. Kelompok pendidikan sebesar 2,86 persen
9. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59 persen dan

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,45 persen

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Komoditas pangan yang mengalami kenaikan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu beras, Cabai dan telur ayam ras. Dikarenakan permintaan yang meningkat sedangkan pasokan komoditas pangan yang sedikit menyebabkan beberapa bahan pangan mengalami kenaikan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah untuk menindaklanjuti harga bahan pangan yang mengalami kenaikan.

Klasifikasi permasalahan :

1. Ketersediaan Pasokan

Perubahan cuaca berkaitan dengan fenomena El Nino yang menyebabkan lahan mengalami kekeringan, mengganggu hari produksi pangan sehingga menuntut pengaturan pola tanam dan pemanfaatan teknologi pangan.

2. Keterjangkauan Harga

Mengantisipasi resiko kenaikan harga pada saat terjadinya fenomena El Nino

3. Kelancaran Distribusi

Hampir sebagian besar kebutuhan pangan di Kabupaten Musi Banyuasin didatangkan dari luar daerah yang melalui jalan negara/provinsi dimana kondisi *jalan tersebut rusak* dan menghambat distribusi barang *serta adanya kenaikan BBM dari Pemerintah berdampak pada kenaikan harga*.

4. Komunikasi Efektif

Belum pahamnya sebagian masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi perlu edukasi yang terus menerus dan perlunya kerjasama yang baik antar Perangkat Daerah (PD) dan

dengan daerah penghasil.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah

1. Hari / Tanggal : Kamis / 04 Juli 2024

Tempat : Auditorium Graha Bina Praja Provinsi Sumatera Selatan

Dalam rangka memperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi Pj. Bupati Musi Banyuasin menghadiri Rapat Koordinasi **High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID Se-Sumatera Selatan**. Mengendalikan Inflasi harus bekerja sama dengan OPD terkait untuk menjaga stabilitas harga, Peningkatan kinerja laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ke Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dengan melibatkan semua OPD tergabung dalam tim pengendalian Inflasi. (Setiap kegiatan yang dilaksanakan terkait pengendalian inflasi harus terdokumentasi dengan baik) dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) memperbanyak kredit untuk UMKM Pertanian.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi pada triwulan III diantaranya melakukan operasi pasar murah beras murah, gerakan pangan murah, menanam cabai dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam mengatasi kenaikan harga beras yang diakibatkan oleh fenomena El Nino. Dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan dapat mengendalikan harga beras dan pangan lainnya di pasar serta meringankan beban ekonomi masyarakat dan Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor pada bulan Juli untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengiatkan kegiatan Rapat Koordinasi / Focus Group Discussion / High Level Meeting baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat.
2. Berkaitan dengan tariff BBM agar dapat dikendalikan oleh Pemerintah dan pembiayaan BBM bersubsidi tepat sasaran.
3. Diharapkan agar Perum Bulog Drive Sumsel untuk dapat menambah SDM agar pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat lebih massif.
4. Optimalisasi kerja sama antar daerah yang dilakukan dengan cara menyuplai pasokan ke daerah-daerah defisit, dari daerah surplus.